

The background of the page is a photograph of a group of women at a public event. The central focus is a woman wearing a bright red hijab and a red top, who is smiling broadly and speaking into a silver microphone. To her left, a woman in a yellow hijab is partially visible, looking towards the speaker. In the foreground, a woman in an orange hijab looks on with a neutral expression. The background is filled with other people, some wearing hijabs and others in more formal attire, all appearing to be part of the same gathering.

## JALUR RUSAK KE POLITIK:

MEMBUKA JALAN DARI  
AKTIVITAS SOSIAL  
AKAR RUMPUT MENUJU  
POLITIK PERWAKILAN

TANYA JAKIMOW, RAMONA VIJEYARASA,  
ASIMA YANTY SIAHAAN, MARIO GOMEZ,  
VIYANGA GUNASEKERA, AIDA FITRIA  
HARAHAP, NADINE VANNIASINKAM,  
DAN YUMASDALENI

---

OKTOBER 2022



## Developmental Leadership

**Program** (Program Kepemimpinan Pembangunan/DLP) adalah kolaborasi penelitian internasional yang didukung oleh Pemerintah Australia.

DLP menginvestigasi peran krusial yang dimainkan para pemimpin, berbagai jaringan dan koalisi dalam mencapai hasil pembangunan.

**dlprog.org**  
**dlp@contacts.bham.ac.uk**  
**@DLProg**

Developmental Leadership Program  
International Development Department  
College of Social Sciences  
University of Birmingham  
Birmingham, B15 2TT  
United Kingdom

Foto halaman depan:  
UN Women, Flickr, Ryan Brown –  
Diskusi komunitas tentang bagaimana perempuan berkontribusi bagi kedamaian di dalam komunitas mereka, Jawa Timur.



Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan yang dinyatakan dalam publikasi ini adalah pandangan penulis semata-mata dan belum tentu merupakan pandangan Pemerintah Australia, Program Kepemimpinan Pembangunan (DLP) atau organisasi mitra.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pedoman singkat riset ini adalah hasil kolaborasi antara Tanya Jakimow, Ramona Vijayarasa, Asima Yanty Siahaan, Mario Gomez, Viyanga Gunasekera, Aida Fitria Harahap, Nadine Vanniasinkam, dan Yumasdaleni.

Proyek riset ini, '[Non-elite pathways to women's political leadership in Sri Lanka and Indonesia](#)' (Jalur nonelit bagi kepemimpinan politik perempuan di Sri Lanka dan Indonesia) adalah bagian dari Developmental Leadership Program, yang dipimpin oleh University of Birmingham dan La Trobe University dan pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Department of Foreign Affairs and Trade /DFAT), Pemerintah Australia [DLPGFA-A].

Kelayakan etik diperoleh dari Komite Etik Penelitian Manusia Australian National University [2019/934].

Terima kasih kepada Sonia Palmieri (ANU) atas umpan balik yang diberikan selama proses tinjauan sejawat.

# DAFTAR ISI

---

Pengantar	4
<b>Tentang penelitian ini</b>	7
<b>Temuan riset</b>	10
Apa yang diperlukan perempuan agar menjadi kandidat politik yang ‘kredibel’?	10
Apa yang menghalangi perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilu?	11
Membuka jalan dari ‘a’ ke ‘b’?	13
<b>Pelajaran yang diambil dan implikasi</b>	19
Menggunakan pendekatan berbasis kekuatan untuk mengidentifikasi dan mendukung perempuan mengikuti kontes pemilu	19
Membangun tim, bukan individu	20
Mengambil pendekatan jangka panjang selama siklus kehidupan perempuan	20
Berinvestasi dalam menghasilkan kelompok kandidat perempuan yang berpotensi, bukan individu	21
Mengubah budaya politik dan naratif politik yang dominan	21
Melibatkan pemangku kepentingan untuk pendekatan spesifik konteks (langkah berikutnya)	22
Referensi	23
Gambar-gambar	25

# PENGANTAR

---

Perempuan di seluruh dunia kurang terwakili dalam jabatan melalui pemilihan. Manakala perempuan menduduki kursi jabatan tersebut, sering kali mereka berasal dari latar belakang elit, sementara itu perempuan dari kalangan sosial ekonomis rendah dan minoritas kurang mampu untuk menapaki jenjang perekrutan politik (Lovenduski 2016). Pada saat yang sama, perempuan dari latar belakang yang beragam sangat aktif dalam kegiatan sosial dan politik akar rumput di luar partai politik, dan lebih mungkin untuk meluangkan waktu mereka menjadi relawan dalam kesejahteraan masyarakat (Tadros 2013).

Apa yang menjelaskan ketidaksinambungan antara besarnya jumlah perempuan yang aktif secara sosial dan politik di tingkat akar rumput dan kecilnya jumlah perempuan yang mengikuti kontes atau memenangi pemilu? Sumber daya apa saja yang dimiliki perempuan akar rumput, dan apa yang mereka perlukan agar menjadi seorang kandidat yang kredibel? Tindakan apa saja yang dapat diambil berbagai organisasi dan badan pengembangan perempuan untuk menambah jumlah wakil terpilih dari kalangan perempuan nonelit?

## TEMUAN PENTING

- Agar menjadi kandidat yang kredibel, perempuan memerlukan kualitas pribadi (keterampilan dan pengetahuan), modal politik (kedudukan moral dan 'kehadiran'), infrastruktur (jejaring sosial, konstituensi dan uang) dan rasa bahwa politik itu 'cocok' dengan jati diri mereka.
- Perempuan yang aktif secara politis dan sosial di tingkat akar rumput mengembangkan sumber daya ini, namun terhambat karena anggapan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian antara sumber daya yang mereka miliki, dan apa yang diperlukan untuk memenangi pemilu.
- Memperbaiki jalan dari kegiatan akar rumput ke politik perwakilan memerlukan empat operasi:
  - *Pengalihan* keterampilan, pengetahuan dan pengalaman, agar mereka diakui dan dihargai dalam bidang politik;
  - *Amplifikasi* modal politik dan kesan yang dibuat perempuan (kehadirannya) di antara konstituensi yang lebih besar jumlahnya;
  - *Perluasan* infrastruktur agar konstituensi politik perempuan berkaitan dengan batas-batas elektoral, jaringan sosial mereka memiliki sumber daya yang dipersyaratkan, dan kekurangan dalam modal keuangan dapat diatasi;
  - *Penafsiran* nilai-nilai, makna dan 'rasa' dari bidang sosial ke bidang politik supaya perempuan dapat melihatnya sesuai dengan jati diri dan ambisi mereka.
- Keempat operasi ini dapat membantu organisasi perempuan, kelompok feminis dan badan pengembangan yang merancang strategi jangka panjang dan berbagai langkah taktis jangka pendek untuk mendorong lebih banyak kandidat perempuan 'akar rumput' agar mencalonkan diri dalam pemilu.

Perempuan di seluruh dunia kurang terwakili dalam jabatan melalui pemilihan. Manakala perempuan menduduki kursi jabatan tersebut, sering kali mereka berasal dari latar belakang elit, sementara itu perempuan dari kalangan sosial ekonomis rendah dan minoritas kurang mampu untuk menapaki jenjang perekrutan politik (Lovenduski 2016). Pada saat yang sama, perempuan dari latar belakang yang beragam sangat aktif dalam kegiatan sosial dan politik akar rumput di luar partai politik, dan lebih mungkin untuk meluangkan waktu mereka menjadi relawan dalam kesejahteraan masyarakat (Tadros 2013).

Apa yang menjelaskan ketidaksinambungan antara besarnya jumlah perempuan yang aktif secara sosial dan politik di tingkat akar rumput dan kecilnya jumlah perempuan yang mengikuti kontes atau memenangi pemilu? Sumber daya apa saja yang dimiliki perempuan akar rumput, dan apa yang mereka perlukan agar menjadi seorang kandidat yang kredibel? Tindakan apa yang dapat diambil berbagai organisasi dan badan pengembangan perempuan untuk menambah banyaknya wakil terpilih dari kalangan perempuan nonelit?

Bilamana perempuan menduduki kursi jabatan yang aman, mereka sering kali berasal dari latar belakang elit, sementara perempuan dari kalangan sosial ekonomis rendah dan minoritas berkemungkinan lebih kecil untuk menandingi atau memenangi pemilu. Namun perempuan dari latar belakang yang beragam sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik akar rumput di luar partai politik. Perempuan berkemungkinan lebih besar daripada laki-laki untuk meluangkan waktu mereka menjadi relawan dalam kesejahteraan dan aktivisme komunitas, dengan banyak prakarsa terkemuka bagi perubahan politik.

Penelitian kami berupaya menjawab mengapa perempuan yang akan menjadi kandidat politik yang memungkinkan dan menjadi wakil terpilih yang berkualitas tidak memanfaatkan pelatihan kepiawaian politik mereka (Cornwall dan Goetz 2005) di berbagai kegiatan akar rumput sebagai landasan untuk memasuki arena politik formal. Kami memeriksa jalur yang rusak mulai dari kegiatan sosial dan politik akar rumput hingga secara resmi mencalonkan diri sebagai kandidat, mengidentifikasi berbagai strategi untuk

mengubah bentuk karier politik di tingkat akar rumput guna mempertinggi kemungkinan strategi tersebut menjadi rute menuju pemilu.

Penelitian kami menemukan jalan tengah antara dua pendekatan luas untuk meneliti keterwakilan politik perempuan. Pendekatan pertama mengidentifikasi rintangan bagi partisipasi perempuan di berbagai tahap berbeda dari perekrutan politik, mengidentifikasi faktor pasokan dan permintaan (Norris and Lovenduski 1993). Pendekatan ini menunjukkan bahwa tekanan waktu, tanggung jawab keluarga, norma-norma sosial yang berlaku pada peran perempuan, kurangnya rasa percaya diri dan ketidaktersediaan sumber daya, antara lain *mengungkung* ambisi politik perempuan (Devika dan Thampi 2012; Iwanaga 2008; Prihatini 2019). Diskriminasi dan prasangka di dalam sistem partai dan publik pemilih *mengecewakan* ambisi politik perempuan (Bjarnegård 2013; White dan Aspinall 2019).

Kedua, pendekatan 'pathways (jalur)' adalah suatu 'pilihan metodologis' (Hawkesworth 2012) yang mulai dengan mengidentifikasi kekuatan dan peluang bagi perempuan untuk masuk ke politik. Penelitian semacam ini mengambil pelajaran dari keberhasilan membantu lebih banyak perempuan mengejar karier politik (Choi 2019; Dewi 2015; Spark et al. 2019). Misalnya, analisis Spark et al. (2019) tentang jalur para pemimpin senior perempuan di kawasan Pasifik mengungkapkan praktik-praktik mengumpulkan, mengubah dan mengalihkan pemanfaatan modal politik untuk memenangi pemilu. Dalam arti ini, penelitian tidak terbatas pada metodologinya dalam mengadopsi dan memungkinkan visi tentang cara perempuan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Minat kami pada khususnya adalah jalur ke politik bagi perempuan dari latar belakang 'akar rumput' dan nonelit. Bagi banyak perempuan, 'pelatihan kepiawaian politik' terjadi dalam lingkungan nonpartai, termasuk organisasi masyarakat sipil, kelompok aktivis feminis, kelompok kesejahteraan masyarakat dan sebagainya (Tadros 2014). Rute-rute ini memengaruhi keefektifan perempuan sebagai pembela hak-hak perempuan setelah berada di parlemen (Cornwall and Goetz 2005).

Yang membedakan kami dari pendekatan 'pathways' adalah fokus yang tidak hanya pada berbagai rute sukses menuju politik perwakilan, tetapi juga pengalaman lebih banyak lagi perempuan yang tidak mengejar, atau tidak mampu meneruskan perjalanan ke kepemimpinan politik. Dalam mengidentifikasi prasyarat yang lebih luas yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari akar rumput ke politik perwakilan, kami menyingkap kesulitan yang dihadapi perempuan dalam melintasi kedua sisi itu.

Kami berupaya memahami bukan hanya pelatihan kepiawaian politik yang dijalani perwakilan terpilih, tetapi juga mengidentifikasi mengapa waktu panjang yang digunakan untuk mengakumulasi keterampilan, pengetahuan, pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjadi seorang wakil terpilih yang efektif tidak cukup untuk menjadi seorang kandidat yang kredibel.

Kontribusi kami adalah pengidentifikasian seperangkat umum operasi yang diperlukan untuk mengubah keadaan perempuan yang aktif di akar rumput menjadi prasyarat yang diperlukan untuk mengikuti kontes pemilu. Kerangka kerja analitis kami membangun pemahaman mengenai mengapa begitu sedikit perempuan akar rumput yang maju sebagai kandidat, dan mengidentifikasi berbagai strategi yang akan memberdayakan lebih banyak lagi perempuan untuk mengalihkan karier di aksi dan aktivisme sosial akar rumput menjadi karier politik.

*Kontribusi kami adalah pengidentifikasian seperangkat umum operasi yang diperlukan untuk mengubah keadaan perempuan yang aktif di akar rumput menjadi prasyarat yang diperlukan untuk mengikuti kontes pemilu.*



# TENTANG PENELITIAN INI

Kami mengembangkan model analitis kami melalui penelitian komparatif di Indonesia dan Sri Lanka. Perbandingan memungkinkan kita tidak terpaku pada suatu studi kasus tunggal tertentu untuk menyingkap operasi yang penting bagi, atau yang mengecewakan dalam, perpindahan dari akar rumput ke politik perwakilan dalam kedua konteks negara ini. Dialog, termasuk dengan perempuan yang telah berhasil dan mereka yang tidak berhasil atau memilih tidak mengikuti kontes, serta para pemangku kepentingan kunci dari kalangan feminis, hak-hak perempuan, akar rumput dan gerakan kaum muda, memungkinkan kami menyempurnakan konsepsualisasi berbagai operasi ini menjadi sudut pandang yang berguna hingga ke luar negara ini. Meski tidak sempurna, ekstraksi tingkat yang lebih tinggi ini adalah untuk pengembangan teori jangka menengah yang dapat beroperasi di luar akar rumput.

Indonesia dan Sri Lanka dipilih karena di kedua negara ini perempuan yang sangat aktif dalam kegiatan sosial dan politik akar rumput signifikan jumlahnya, bersamaan dengan kurangnya keterwakilan wanita yang sangat mencolok di parlemen dan badan legislatif. Kami ingin melihat apakah alasan kandidat perempuan akar rumput tidak mengikuti kontes atau memenangi pemilu sama di setiap negara, dan apa yang dapat kita pelajari dari membandingkan keduanya.

Dalam mengenali masalah kurangnya keterwakilan perempuan, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang bahwa setiap satu dari tiga posisi di lembar surat suara harus diduduki oleh seorang perempuan. Efeknya positif, tetapi belum mencapai dampak yang diinginkan para pendukung feminis. Perempuan secara konsisten ditempatkan pada posisi 3, 6, 9 pada surat suara/daftar partai, pada posisi itu lebih sulit untuk terpilih (Prihatini

2019a), dan sering kali dinominasikan semata-mata agar membuka lebih banyak posisi bagi laki-laki.

Anggota parlemen wanita Indonesia secara tidak proporsional terus merupakan kalangan 'elit', yang kaya, dengan koneksi keluarga atau 'status selebriti'. Dari 118 legislator terpilih pada tahun 2019, 44 persen memiliki koneksi dinasti (Wardani dan Subekti 2021), membuah komentar bahwa kuota telah sangat memperbesar kecenderungan untuk menominasikan perempuan 'terkenal' daripada kandidat perempuan akar rumput. Umumnya, kuota menjamin tiga puluh persen kandidat adalah perempuan belum mampu meninggikan persentase perempuan yang terpilih dalam badan legislatif secara signifikan di Indonesia, tidak juga mencapai keterwakilan yang substantif melalui kelompok politisi yang beragam (Prihatini 2019b). Persentase perempuan yang terpilih ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap di bawah tiga puluh persen, meningkat dari 17,3 persen dalam tahun 2014 menjadi 20,5 persen dalam tahun 2019.

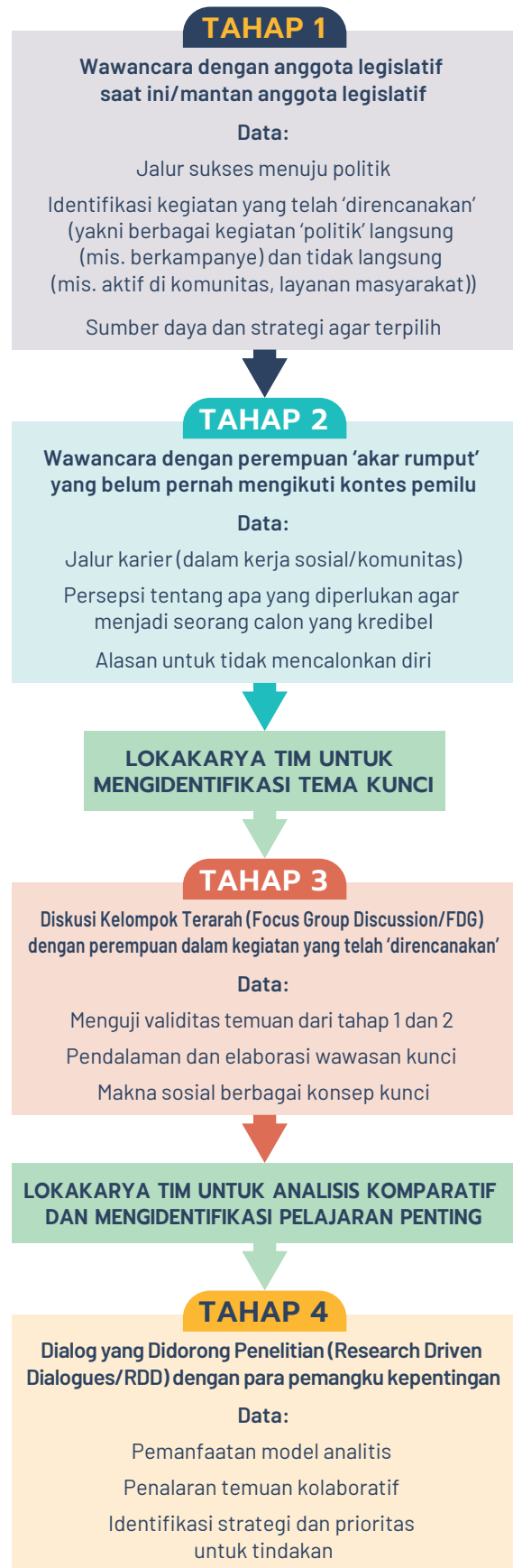
Hanya 5,4 persen anggota Parlemen Sri Lanka adalah perempuan sejak pemilu dalam tahun 2019, jauh lebih rendah dari negara-negara lain di Asia Selatan (IPU 2022). Kinerja yang demikian buruknya meskipun perempuan diperbolehkan mencalonkan diri untuk pemilu sejak 1932, dan memiliki Perdana Menteri wanita terpilih pertama di dunia (yakni Sirimavo Bandaranaike) pada tahun 1960. Namun demikian, kebanyakan pemimpin wanita mengikuti fenomena Asia Selatan dari janda, istri dan anak perempuan masuk ke dalam politik setelah kematian anggota keluarga laki-laki (Jayawardena dan Kodikara 2003), walaupun pembatasan terhadap kerangka ini telah ditentang akhir-akhir ini (Vijayarasa, 2022). Dari ke-12 perempuan yang saat ini menjadi anggota parlemen, tujuh dari mereka mengawali keanggotaan di parlemen karena kematian kerabat laki-laki (Hannan 2020). Dalam bagian

upaya untuk menanggapi kehadiran perempuan yang rendah di politik, Sri Lanka memperkenalkan kuota bagi perempuan pada tingkat pemerintah daerah (amandemen legislatif 2012, 2016 dan 2017). Kuota menambah persentase perempuan yang terpilih di jabatan lokal dari 1,9 dalam tahun 2016 menjadi 29 persen dalam tahun 2020 (Vijayarasa, 2020). Apakah pengalaman pada tingkat daerah memberi peluang pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi masih belum diketahui.

Penelitian dilakukan antara Oktober 2020 dan Juni 2021, dan pada berbagai titik, dimodifikasi karena pandemi Covid. Karena pembatasan perjalanan, temuan kami terbatas pada Sumatera Utara di Indonesia, dan 14 dari 25 distrik di Sri Lanka. Metode penelitian sama di kedua negara, tetapi dengan variasi dalam ukuran sampel dan karakteristik populasi agar sesuai dengan kondisi setempat misalnya, memastikan keberagaman etnis dan linguistik sebanyak mungkin.

**Urutan tahap penelitian:** Empat tahap penelitian dirancang dan diurutkan supaya kami mengembangkannya berdasarkan temuan penelitian, sementara memberi peluang untuk berbagi dan memodifikasi tahap-tahap ini dengan para pemangku kepentingan utama. Wawancara semula menghasilkan data yang mendalam dan kaya tentang jalur perempuan ke politik (wakil terpilih saat ini dan mantan wakil terpilih)(tahap 1), lalu membandingkan pengalaman mereka dengan perempuan yang aktif di akar rumput tetapi belum pernah mencalonkan diri untuk pemilu (tahap 2). Wawancara merekam bagaimana responden memandang dunia sosial mereka, pemahaman diri mereka di dalam dunia sosial ini, dan peluang yang tersedia bagi mereka di dalamnya. FDG memungkinkan kami untuk menyempurnakan pemahaman kami tentang dunia sosial bersama ini dan menguji validitas berbagai tema (tahap 3). Tahap 4 perlu melibatkan Dialog yang Didorong Penelitian dengan para pemangku kepentingan utama guna menyempurnakan dan menyebarkan temuan. Proses penelitian inovatif ini dirangkum di Gambar 1.

## GAMBAR 1: URUTAN TAHAP PENELITIAN





**TABEL 1: TAHAP PENELITIAN DAN PESERTA**

Tahap	Indonesia	Sri Lanka
Tahap 1: Wawancara dengan politisi saat ini/mantan politisi	7 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat ini di tingkat Kota dan Provinsi (Medan dan Sumatera Utara)	7 wakil terpilih saat ini atau mantan wakil terpilih pada tingkat daerah setempat, provinsi, dan nasional (seluruh negara)
Tahap 2: Wawancara dengan para pemimpin organisasi yang berkaitan dengan komunitas dan catatan kegiatan sosial dan politik, tetapi yang belum pernah mencalonkan diri dalam pemilu	9 peserta dari organisasi keagamaan (Islam, Hindu, Buddha, Parmalim/kepercayaan Batak asli dan Kristen)	6 peserta yang mewakili berbagai kelompok etnis Sinhalese, Tamil, Muslim, keturunan Tamil India dan Burgher, dan agama: Buddha, Kristen, Hindu dan Islam
Tahap 3: FDG dengan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan yang telah 'direncanakan' (masing-masing 3-12 peserta)	5 FDG dengan para aktivis mahasiswa, pemimpin organisasi keagamaan non-Muslim; pemimpin berbagai kelompok doa Muslim; pemimpin LSM atau organisasi masyarakat, dan; kader partai (laki-laki dan perempuan)	6 FDG dengan para aktivis komunitas, wakil LSM lokal, perempuan yang menduduki jabatan pemerintah, mantan anggota badan perwakilan setempat, dan mantan anggota parlemen muda wanita
Tahap 4: Dialog yang didorong penelitian dengan para pemangku kepentingan	RDD ke-1 di Medan RDD ke-2 di Jakarta	RDD ke-3 di Sri Lanka

**KOTAK 1: BAGAIMANA KITA MENGIDENTIFIKASI KANDIDAT PEREMPUAN AKAR RUMPUT**

Kandidat 'akar rumput' merujuk pada seorang perempuan yang berpengetahuan dan tanggap terhadap warga negara 'biasa', didorong oleh motivasi untuk melayani dan menjadi wakil yang efektif. Namun demikian, seorang perempuan juga harus memiliki peluang yang kredibel untuk terpilih. White dan Aspinall merekam kedua aspek ini ketika mereka (2019: 3) "merujuk pada kandidat yang memiliki pengalaman politik..., dan/ atau yang memiliki dasar dukungan masyarakat yang kuat melalui kepemimpinan dalam berbagai macam organisasi, dan yang bermotivasi untuk melayani masyarakat mereka melalui partisipasi politik". Kami mengidentifikasi perempuan yang memiliki catatan panjang dalam kegiatan sosial dan/atau politik pada tingkat akar rumput dan yang didorong untuk mengupayakan perubahan positif.

## TEMUAN RISET

---

### APA YANG DIPERLUKAN PEREMPUAN AGAR MENJADI KANDIDAT POLITIK YANG 'KREDIBEL'?

Menurut para peserta penelitian, empat set persyaratan diperlukan bagi perempuan yang ingin mengikuti kontes pemilu, dan yakin bahwa mereka memiliki kesempatan berhasil yang realistis.

- 1. Modal manusia:** mencalonkan diri bagi pemilu dan menjadi wakil yang efektif memerlukan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang relevan. Ini termasuk: keterampilan kepemimpinan, pembuatan keputusan, memobilisasi orang, memecahkan masalah dan berbicara di depan publik; pengetahuan tentang isu sosial, hukum, dan struktur politik; implementasi proyek dan pengelolaan keuangan; dan kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai macam orang, mulai dari para pekerja informal hingga para pejabat tingkat tinggi.
- 2. Modal politik:** kesan yang dibuat perempuan pada publik pemilih, reputasi mereka, seterkenal apa mereka, dan anggapan keabsahan mereka untuk memimpin. Perempuan membangun modal politik melalui nama keluarga, kedudukan moral dan bekerja di komunitas mereka. Sumber penting modal simbolis dalam penelitian Spark et al. (2019) adalah hubungan keluarga. Nama keluarga dapat memberi keabsahan politis dan 'manfaat legasi' bagi perempuan dalam politik (Baker dan Palmieri 2021; Spark et al. 2019). Tetapi, modal simbolis adalah sumber daya yang telah dikumpulkan oleh perempuan dalam penelitian kami, berdasarkan pilihan. Namun mereka mendapatinya sulit untuk membuat kesan dengan konstituensi yang lebih luas, karena terbatasnya 'suara' yang dihasilkan oleh tindakan mereka.
- 3. Infrastruktur:** apa yang perlu ada sebelum perempuan mempertimbangkan untuk mencalonkan diri pada pemilu, merujuk tidak pada individu, tetapi lebih pada kondisi yang mendukung. Tiga elemen yang krusial: konstituensi politik, modal keuangan, dan jaringan pendukung.
- 4. Pemahaman diri:** apakah perempuan memandang diri mereka sendiri sebagai pelaku di dalam kancah politik, dan kancah politik sebagai ruang tempat mereka dengan nyaman menguasai dan mencapai ambisi mereka.

---

*Perempuan memiliki keunggulan, pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi wakil terpilih yang luar biasa, namun elit partai, dan dalam tingkat yang lebih rendah publik pemilih, kurang menghargai atau tidak mengakui modal manusia mereka.*


## APA YANG MENGHALANGI PEREMPUAN UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILU?

Perempuan yang aktif pada akar rumput dan terlibat dalam karya sosial dan masyarakat telah memperoleh banyak prasyarat yang diperlukan untuk mengikuti kontes pemilu, tetapi merasa bahwa mereka tidak memadai atau tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan.

- Perempuan memiliki syarat keunggulan, pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi wakil terpilih yang luar biasa, namun **elit partai, dan dalam tingkat yang lebih rendah publik pemilih, kurang menghargai atau tidak mengakui modal manusia mereka**, atau memandangnya sebagai tidak berhubungan dengan apa yang dibutuhkan dalam politik.
- Tindakan positif perempuan dan kedudukan moral yang tinggi dalam masyarakat berarti bahwa mereka sangat dihargai, tetapi **sering kali berita mengenai karya mereka yang baik tidak menyebar di luar wilayah setempat mereka**. Perempuan dikenal, tetapi tidak cukup 'terkenal' (terkemuka) untuk memiliki pengikut yang besar jumlahnya.
- Perempuan telah membangun jejaring sosial dan konstituensi politik melalui kegiatan sosial mereka, namun sering kali ini **kurang memiliki solidaritas atau syarat keterampilan untuk mengikuti kontes pemilu, atau tidak cocok dengan batas-batas elektoral**. Yang penting sekali, perempuan merasa bahwa tanpa sejumlah besar uang, mereka tidak akan menjadi kompetitif dalam suatu pemilu.
- Banyak perempuan menganggap politik sebagai 'wilayah kotor' bagi tindakan demi kepentingan sendiri, **tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka dalam memberlakukan perubahan positif dan siapa mereka sebagai seseorang**. Perempuan juga dibuat merasa tidak nyaman ketika terlibat dalam politik partai, melalui rasa maskulin politik dan ancaman kekerasan yang eksplisit. Persetujuan keluarga adalah penting. Di Sri Lanka, sentimen seperti itu sangat kuat. Di sana tidak ada responden yang berbicara tentang kurangnya dukungan keluarga atau secara aktif mematahkan semangat sebagai menghalangi keterlibatan mereka dalam karya sosial, namun mereka semua membutuhkan persetujuan keluarga untuk masuk ke ajang politik.

© DFAT / Flickr / Josh Estey



			
<b>Apa yang diperlukan agar menjadi seorang calon yang kredibel</b>	<b>Berbagai rintangan yang dihadapi perempuan</b>	<b>Bagaimana membuka jalurnya</b>	<b>Langkah-langkah praktis</b>
<b>Modal manusia:</b> Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang relevan.	Perempuan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman untuk menjadi wakil terpilih yang luar biasa, namun <b>modal manusia mereka tidak diakui, kurang dihargai</b> , menimbulkan ancaman, atau dipandang sebagai tidak berhubungan dengan kebutuhan elit partai dan publik pemilih.	<b>Pengalihan</b> keterampilan, pengetahuan dan pengalaman, agar mereka diakui dan dihargai dalam bidang politik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1: Bekerja dengan elit partai supaya mereka dapat mengapresiasi dan menghargai apa yang disumbangkan perempuan ke politik</li> <li>2: Pelatihan untuk perempuan dalam keterampilan negosiasi dan pembuatan tuntutan</li> </ol>
<b>Modal politik:</b> Persepsi dari publik pemilih termasuk reputasi, visibilitas dan legitimasi untuk memimpin.	Berita mengenai hasil karya <b>tidak menyebar ke luar wilayah lokal mereka</b> , meskipun tindakan positif dan kedudukan moral mereka yang tinggi dalam masyarakat. Perempuan dikenal, tetapi tidak cukup 'terkenal' untuk memiliki pengikut yang besar jumlahnya.	<b>Amplifikasi</b> modal politik dan kesan yang dibuat perempuan di antara konstituensi yang lebih besar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1: Bekerja dengan berbagai organisasi media untuk mempromosikan hasil karya yang baik dari perempuan</li> <li>2: Memberi pelatihan media bagi perempuan, termasuk media sosial</li> <li>3: Pelatihan dan pengelolaan acara</li> <li>4: Regulasi media sosial</li> </ol>
<b>Infrastruktur:</b> Kondisi dukungan yang perlu ada, terutama konstituensi politik, modal keuangan, dan jaringan pendukung.	Perempuan kurang memiliki solidaritas atau syarat keterampilan untuk mengikuti kontes pemilu, atau tidak cocok dengan batas-batas elektoral. Perempuan merasa bahwa <b>tanpa sejumlah besar uang, mereka tidak akan menjadi kompetitif</b> .	<b>Perluasan</b> infrastruktur agar konstituensi politik perempuan sesuai dengan batas-batas elektoral, jaringan sosial memiliki sumber daya yang dipersyaratkan, dan kekurangan dalam modal keuangan dapat diatasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1: Mendorong perempuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akar rumput selaras dengan peta elektoral</li> <li>2: Membangun jaringan solidaritas</li> <li>3: Membangun kapasitas tim</li> <li>4: Mempromosikan naratif keberhasilan kandidat dengan kampanye murah</li> </ol>
<b>Pemahaman diri:</b> Persepsi perempuan tentang diri mereka sendiri sebagai pelaku politik, dan kancah politik sebagai ruang mereka dapat dengan nyaman menguasai dan mencapai ambisi mereka.	Perempuan menganggap politik sebagai 'wilayah kotor' bagi tindakan yang menarik bagi diri sendiri, <b>bertentangan dengan memberlakukan perubahan positif dan siapa mereka sebagai seseorang</b> . Perempuan juga dibuat merasa tidak nyaman melalui rasa maskulin politik dan ancaman kekerasan yang eksplisit.	<b>Penafsiran</b> nilai-nilai, makna dan 'rasa' dari bidang sosial ke bidang politik supaya perempuan dapat melihatnya sebagai sesuai dengan jati diri dan ambisi mereka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1: Sosialisasi dini dan terus menerus</li> <li>2: Menekankan kesesuaian antara bidang sosial dan politik</li> <li>3: Mencari peluang melalui perkumpulan berbasis agama dan etnis.</li> <li>4: Menantang persepsi politik itu 'kotor'</li> </ol>

# MEMBUKA JALAN DARI 'A' KE 'B'?

Empat set operasi umum diperlukan untuk mengubah keadaan perempuan yang aktif di akar rumput menjadi prasyarat yang penting untuk kontes pemilu.

## 1. *Pengalihan*: Menjadikan modal manusia diperhitungkan dalam ajang politik

*Pengalihan* menggambarkan operasi yang diperlukan untuk menyampaikan (menjadi diperhitungkan) keterampilan, pengetahuan dan pengalaman perempuan yang diperoleh dalam kegiatan sosial dan politik akar rumput ke politik formal. Perempuan dalam penelitian kami tidak dirugikan dari kesenjangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi dari kurangnya pengakuan, oleh mereka sendiri dan orang lain mengenai keberagaman dan kualitas dari apa yang mereka sumbangkan. Partai-partai politik tampak (mungkin sengaja) kurang mengetahui kualitas yang ditawarkan perempuan dari puluhan tahun karya dan aktivisme sosial berbasis masyarakat mereka.

Pengetahuan politik, keterampilan kepemimpinan dan pengalaman kecil harganya ketika nominasi dibagikan. Elit partai menolak nominasi untuk pemimpin perempuan yang luar biasa bagus dan memilih menempatkan anggota keluarga dekat dan kawan mereka. Bilamana bisa dikatakan terdapat kesenjangan keterampilan, ini mengarahkan sistem partai menuntut pengakuan dan imbalan. Justru keterampilan yang ditunjukkan perempuan kadang-kadang mengintimidasi (terutama pria) elit partai yang menekan daripada menghargai perangkat keterampilan ini. Agar menanjak dalam hal politik, keterampilan perempuan harus merupakan hal yang memastikan pelatihan kepiawaian politik yang diberikan di politik akar rumput memiliki relevansi dan nilai di eselon atas partai politik.

*Partai-partai "menjaga perempuan tetap menjadi prajurit rendahan alih-alih memberi mereka peran pimpinan atau peran pembuatan keputusan"*

(Sri Lanka FGD1).

*"Pada masa mendatang, jika kita akan direkrut oleh partai-partai sebagai kandidat, kita harus berani dan menawar dengan mereka... Kita tidak boleh hanya dimasukkan sebagai angka"*

(pemimpin perempuan akar rumput, Indonesia)

Kami menggambarkan berbagai operasi ini sebagai *pengalihan*, tempat keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan akar rumput menyimpan nilai ketika dialihkan ke politik formal. Terdapat dua elemen. Yang pertama adalah meyakinkan elit partai tentang nilai keterampilan, pengetahuan dan pengalaman mereka, supaya apa yang telah mereka peroleh melalui aktivisme dan karya sosial akar rumput diakui sebagai berharga. Elemen kedua adalah untuk perempuan bernegosiasi dengan elit partai agar partai memberi penghargaan kepada perempuan atas kontribusi yang mereka buat, dengan menolak memberi tenaga atau nama mereka kepada partai (dalam hal kuota) kecuali muncul dengan peluang politik nyata. Pembangunan kapasitas yang melengkapi perempuan dengan keterampilan dan pengetahuan dalam arti yang lebih umum kurang penting dibandingkan menolong perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan imbalan untuk apa yang sudah mereka ketahui dan lakukan.

## 2. Amplifikasi: Memperkuat kesan positif yang dibuat kaum perempuan

Responden kami telah mencurahkan waktu yang signifikan dalam masyarakat, namun tidak mampu membuat kesan yang cukup kuat agar berhasil. *Amplifikasi* merujuk pada memperkuat modal politik perempuan supaya meliputi wilayah yang lebih luas (memetakan ke suatu elektorat), dan menimbulkan perasaan positif yang kuat di antara para pemilih.

Sementara nama keluarga dan keunggulan legasi (Baker dan Palmieri 2021; Spark et al. 2019) memungkinkan sejumlah kecil perempuan (kebanyakan kalangan 'elit') agar berhasil dalam politik, pertanyaan yang lebih besar bagi peserta penelitian kami adalah bagaimana mengatasi kekurangan dari tidak memiliki modal. Sebuah alternatif adalah modal simbolis dari kedudukan moral yang baik. Di seluruh sampel kami, perempuan menampilkan kerendahan hati, kejujuran, semangat komunitas dan orientasi layanan.

Ada dua tantangan dalam mengubah sentimen positif yang dihasilkan melalui berbagai tindakan sosial dan kedudukan moral menjadi peluang politik. Pertama adalah waktu yang diperlukan untuk mengumpulkannya, membangun catatan karya sosial selama periode jangka panjang yang memakan waktu dan norma-norma gender mensyaratkan perempuan menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat daripada laki-laki. Kedua adalah 'tidak terdengarnya' modal simbolis perempuan dalam kancah politik yang bising. Dalam kata lain, sementara perempuan mungkin terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang menunjukkan kedudukan moral mereka, segelintir orang tahu tentang mereka, dan oleh karenanya tidak terkumpul sebagai modal.

Media memiliki peran yang belum diwujudkan dalam mengamplifikasi kesan positif yang dimiliki perempuan dalam elektorat dengan mempromosikan berbagai kegiatan sosial mereka (Vijayarasa et al., akan terbit). Sayangnya sekali, media lebih mungkin memainkan peran negatif, jarang mempromosikan aktivisme dan kepemimpinan perempuan tingkat akar rumput, dan cepat mempublikasikan kesalahan dan penampilan lahiriah perempuan. Liputan media yang diterima perempuan sebagian besar berada dalam kondisi terbatas. Misalnya, karena ada

### KOTAK 2: AMPLIFIKASI

Sherry adalah seorang legislator wanita di Indonesia. Ia telah membangun basis dukungan yang besar dengan berhubungan dengan orang-orang di 'akar rumput', mempromosikan dirinya sendiri, dan karya yang telah ia lakukan di masyarakat tersebut. Ia menggunakan media sosial untuk merenggut perhatian orang, dan kemudian mengorganisasi berbagai acara yang banyak dihadiri orang. Pada awalnya, ia akan bernyanyi pada acara-acara ini supaya pemilih mengingatnya.

pembatalan oleh politisi lain, atau penyiaran pada saat orang biasanya tidak menonton televisi (FGD 2 2021). Uang, atau kurangnya uang, juga memengaruhi akses perempuan terhadap publisitas baik pada media mainstream ( arus utama) dan media sosial.

Beberapa perempuan telah berhasil dalam memperoleh publisitas bagi kandidat perempuan dengan mengundang surat kabar lokal untuk menerbitkan artikel dan foto-foto, kebanyakan kesulitan dan mencari pembangunan kapasitas pada navigasi media. Sebagai pengakuan mengenai pelecehan online yang dihadapi perempuan, berbagai langkah perlu diambil untuk mengatur media sosial agar memperbolehkan perempuan menggunakannya sebagai platform untuk membangun pengikut secara aman.

Di Indonesia, beberapa kandidat telah berhasil mengamplifikasi karya mereka dengan menyelenggarakan berbagai acara—seperti pusat kesehatan dan konser—yang menarik perhatian sejumlah besar pemilih dan beberapa media. Prakarsa untuk membuat lebih banyak perempuan terpilih dapat berfokus pada promosi karya yang mereka lakukan melalui strategi inovatif ini.

### 3. Perluasan: Strategi untuk mengatasi kekurangan dalam infrastruktur

Tiga elemen dalam suatu infrastruktur itu krusial: konstituensi politik, modal keuangan, dan jaringan pendukung. Perempuan telah membangun infrastruktur seperti itu melalui kegiatan politik dan sosial akar rumput mereka, tetapi untuk kebanyakan perempuan, hal ini tidak memadai, atau sebagai alternatif, tepatnya tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan. Terdapat kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada bagi perempuan agar memenuhi kondisi yang menjadi syarat agar suatu kampanye dapat berjalan.

Perempuan yang sengaja dipilih dalam penelitian ini adalah yang memiliki riwayat layanan masyarakat, dan oleh karenanya 'konstituensi' adalah bagian dari apa yang membuat mereka seorang kandidat yang dapat berhasil. Tetapi, bagi banyak perempuan, hubungan masyarakat yang telah ada tidak mencukupi; hubungan dengan masyarakat bisa melintas berbagai divisi elektoral, mengurangi seberapa baik mereka dikenal di konstituensi manapun; atau terkonsentrasi di daerah yang lebih kecil, tidak cocok dengan populasi pemilih yang lebih besar. Pendekatan jangka panjang agar mencapai lebih banyak perempuan akar rumput dalam politik akan dengan perlahan-lahan menyengol kegiatan sosial mereka agar selaras dengan batas wilayah elektoral sejak awal karier mereka. Bagi perempuan yang sudah menjadi pekerja sosial dan aktivis, mereka memerlukan dukungan untuk memperluas konstituensi politik mereka.

—

*Membangun kapasitas kandidat untuk menjalankan kampanye yang berhasil lebih baik dianggap sebagai memperluas jaringan dukungannya dan kapasitas tim yang lebih besar.*

Jaringan pendukung yang berkomitmen merupakan elemen penting dari infrastruktur elektoral orang itu sendiri, sembari membantu memperluas konstituensi politik kandidat. Mereka menyediakan tenaga kerja selama kampanye, memobilisasi para pemilih, mengamplifikasi acara kampanye, dan memanfaatkan hubungan mereka sendiri dengan masyarakat untuk memperbesar niat baik dan kepercayaan. Jaringan dukungan itu penting bagi perempuan sebagai sandaran untuk mendapat nasihat dan dorongan, sambil memenuhi kebutuhan keterampilan profesional, seperti pelibatan media, pengelolaan kampanye, pembuatan anggaran dan sebagainya, itu berharga dalam kampanye.

Semua perempuan dalam penelitian kami memiliki jejaring yang kuat, namun mereka menghadapi dua tantangan. Solidaritas yang begitu nyata di antara perempuan yang terlibat dalam karya masyarakat tampaknya tidak hadir dalam politik formal, tempat kompetisi di antara perempuan lebih umum. Terdapat kebutuhan untuk memperluas jaringan solidaritas perempuan untuk mencakup politisi yang bersedia menjadi kawan yang saling membantu, mentor dan meyakinkan perempuan akar rumput. Jejaring perempuan memiliki kapasitas besar untuk memobilisasi dan mengorganisasi masyarakat, namun kurang piawai dalam mengurus keuangan kampanye, pelibatan media, pengelolaan acara berskala besar. Membangun kapasitas kandidat untuk menjalankan kampanye yang berhasil lebih baik dianggap sebagai memperluas jaringan dukungannya dan kapasitas tim yang lebih besar.

"jika kita berbicara mengenai politik praktis, tidak cukup hanya menjadi terkenal, tidak cukup hanya cerdas, bukan? Anda perlu uang juga. Uang, uang, saya tidak punya uang sama sekali, apalagi 200 juta" [rupiah Indonesia] (Hanum, Indonesia).

Banyak perempuan memiliki infrastruktur yang memadai terkait konstituensi politik dan jaringan dukungan, namun kurang dalam elemen ketiga yang dianggap krusial untuk mengikuti kontes pemilu: modal keuangan. Kurangnya uang, atau keengganan untuk menanggung risiko keuangan yang dapat dipahami, dianggap sebagai kesulitan untuk menjadi seorang kandidat. Namun, penelitian kami lebih dari interpretasi dominan tentang dibutuhkannya uang untuk membawa visibilitas bagi modal sosial dan norma-norma sosial yang menopang keuangan partai. Pemilu itu sangat mahal karena berbagai praktik seperti pembelian suara, atau penyediaan barang-barang klub, dan biaya kampanye seperti pembayaran ke relawan, materi promosi, cendera mata untuk pemilih, perjalanan, makanan dan minuman, dan sebagainya. Di Indonesia, tidak mungkin melakukan penggalangan dana dari masyarakat dalam konteks ketika orang-orang mengharapkan politisi membayar suara pemilih; di Sri Lanka, terdapat distribusi dana kampanye partai yang tidak adil untuk laki-laki dan perempuan.

Namun perempuan dengan konstituensi politik yang cukup besar dan jaringan dukungan (selain amplifikasi modal politik) mampu memperbesar sumber daya keuangan mereka untuk mengurangi investasi kampanye secara keseluruhan. Dari pada mengangap jumlah tunai yang besar sebagai prasyarat yang penting untuk mencalonkan diri dalam pemilu, lebih berguna untuk memandangnya sebagai jalan pintas ketika seseorang belum membangun konstituensi politik atau jaringan dukungan yang diperlukan untuk memenangi pemilu (yakni, dua pilar lainnya dari infrastruktur seseorang) (Mahsun et al. 2021; Harahap et al. 2022). Pendekatan berbasis kekuatan membantu perempuan yang berambisi untuk mengenali kekuatan hubungannya dengan masyarakat dan jaringan dukungannya membantu mengatasi kekurangan modal keuangan.

© Shutterstock / 1379637470





#### 4. Penafsiran: Pemahaman diri yang sesuai dengan bidang politik

Kami mendapati bahwa perempuan yang memenuhi prasyarat lainnya untuk menjadi kandidat mengalami ketidakselarasan antara gagasan menjadi seorang politisi dan pemahaman diri mereka sendiri. Terdapat dua elemen di sini. Pertama, sumber daya sosial dan budaya berdasar gender bagi perwujudan diri yang memengaruhi pemahaman seseorang tentang siapa dirinya, dan dapat menjadi siapa dia (Ortner 2006). Elemen kedua adalah reproduksi 'bidang politik', dipahami sebagai ranah tempat berbagai badan secara berbeda nyaman, dan secara berbeda 'cocok' (Puar 2004).

Kami menentang bahwa mendorong lebih banyak perempuan untuk membayangkan pemahaman diri sebagai wakil terpilih memerlukan penafsiran antara kedua elemen ini. Dengan penafsiran, yang kami maksudkan adalah proses menjadi 'sesuai dengan' atau cocok untuk bidang politik.

"Kami telah terlibat dalam banyak kegiatan sosial, dan melalui keterlibatan ini kami telah menyadari begitu banyak masalah yang harus ditangani perempuan, dan dengan menangani masalah ini, keinginan kami sendiri muncul, minat kami untuk mengejar politik praktis" (Pemimpin Kaum Muda Indonesia).

"tidak ada ruang dalam masyarakat bagi mereka yang sungguh-sungguh bersedia membuat komitmen seperti itu ... orang-orang di negara kami kini telah menjadikan politik sebagai sumber penghasilan. Orang-orang seperti itu telah menutup ruang bagi mereka yang hendak membuat pengorbanan suka rela" (Sri Lanka FGD6).

"Saya kira menjadi anggota DPRD [dari Dewan Perwakilan Rakyat] itu bagaikan berenang dalam lumpur. Setiap kali Anda berenang, lumpur terteguk" (Indonesia CS14).

Kerja sosial bagi banyak perempuan dalam penelitian kami adalah suatu panggilan yang erat kaitannya pada pemahaman diri mereka. Bagi beberapa, politik adalah strategi untuk membantu mengatasi ketidakberdayaan yang mereka hadapi dalam kegiatan sosial mereka. Lainnya memandang kesesuaian dalam hal yang lebih pragmatik; mereka membina hubungan dalam komunitas melalui kegiatan sosial mereka, yang kemudian dituai dalam bentuk dukungan elektoral.

Tetapi, lebih banyak responden tidak memandang kegiatan sosial mereka sesuai dengan politik 'praktis', atau tidak menampung ambisi untuk masuk ke ranah politik. Beberapa menolak gagasan bahwa kedua ranah tersebut berorientasi ke arah perubahan positif. Politik dianggap suatu lingkup minat pribadi yang tidak sesuai dengan kerja komunitas. Perempuan lainnya merasa bahwa mereka dapat mencapai lebih banyak di luar politik daripada di dalamnya. Partai politik membatasi kegiatan yang dapat dilakukan anggota, jadi beberapa memilih untuk tetap berada di luar politik supaya dapat mengejar apa yang paling bermakna bagi mereka. Ketika perubahan sosial adalah ambisi utamanya, politik tidak dipandang sebagai rute yang efektif baik di Indonesia maupun Sri Lanka.

*Perempuan yang memenuhi prasyarat lainnya untuk menjadi kandidat mengalami ketidakselarasan antara gagasan menjadi seorang politisi dan pemahaman diri mereka sendiri.*

Persepsi publik bahwa 'politik itu kotor' juga menghambat perempuan untuk memandang politik sebagai tempat yang layak bagi mereka. Karena 'politik praktis' dianggap sebagai korup dan kotor, perempuan di akar rumput meremehkan partai politik, dan menampik ajakan untuk bergabung dengan partai mereka. Penolakan seperti ini membantu partai-partai mempertahankan anggapan bahwa mereka tidak mampu memenuhi kuota karena perempuan tidak bersedia mencalonkan diri sebagai kandidat.

Bahkan ketika perempuan bersedia untuk 'menjadi kotor' dengan memasuki politik dan memiliki uang dan keterampilan untuk bersaing, keluarga sering kali tidak akan memberi persetujuan mereka. Di Sri Lanka, sentimen seperti ini sangatlah kuat, semua perempuan memerlukan keterlibatan keluarga untuk memasuki politik karena potensi stigma yang ada, namun tidak ada yang mencatat kurangnya dukungan keluarga, atau mengecilkan semangat yang aktif sebagai merintang keterlibatan mereka dalam kerja sosial. Reproduksi politik sebagai lingkup maskulin menciptakan ketidaksesuaian yang lebih jauh lagi dengan model sosial kewanitaan. Politik masa kini dirujuk sebagai 'seni populer

### **KOTAK 3: PENAFSIRAN**

Eva dari Medan aktif di politik dan mencoba merekrut sebanyak mungkin perempuan untuk bergabung dengannya. Ia menggambarkan strategi rekrutmennya: "Jika kita mendekati seorang perempuan dan memintanya untuk bergabung dengan gerakan berbasis politik atau perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, menurut pengalaman kami ia akan menjauhkan diri. [Tetapi jika kita mengatakan] "Mari kita berpolitik, mari kita bergabung dengan partai, karena di dalam partai ada kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan lain" ia akan bergabung."

pembuatan uang' yang profesional, ruang bagi laki-laki, bukan bagi perempuan (Jakimow et al., akan terbit).

Masalah ketidakselarasan antara pemahaman diri dan ranah politik bukan masalah yang terlalu besar untuk diatasi, namun memerlukan pendekatan jangka panjang untuk memperbesar kemungkinan diri bagi perempuan dan menantang reproduksi diskursif dari ranah politik sebagai 'kotor' dan maskulin. Beberapa politisi wanita berbicara tentang pentingnya sosialisasi dini untuk memandang politik sebagai ruang yang terbuka bagi perempuan. Strategi lain mencakup menekankan kesesuaian antara apa yang dilakukan perempuan, apa yang penting bagi mereka, dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri, di dalam ranah politik.

Bagi beberapa perempuan, meningkatnya peran Islam di politik Indonesia telah menciptakan peluang. Agama dianggap sebagai sesuai dengan politik, dan oleh karenanya kegiatan perempuan, termasuk kepemimpinan agama dan tindakan kesalehan, sesuai dengan politik praktis. Di Sri Lanka, identitas etnis agama, terutama bagi kaum minoritas, memotivasi perempuan untuk memasuki politik.

Tindakan penafsiran diperlukan untuk memperlihatkan kesesuaian antara berbagai ranah yang berbeda—sosial, agama, etnis agama dan politik—bukan hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi keluarga dan pendukung mereka. Proses perwujudan diri dan pembaruan kembali suatu ranah politik sebagai 'kotor' dan maskulin saling berkaitan. Sementara kita perlu memperluas kemungkinan kepribadian bagi perempuan, mungkin tugas yang lebih besar adalah menantang persepsi umum tentang politik. Tugas bagi lembaga yang mengupayakan lebih banyak perempuan, lebih banyak aktivis 'akar rumput', praktik-praktik demokrasi yang lebih baik, adalah untuk memfasilitasi penafsiran antara berbagai ranah kerja sosial dan politik.

# PELAJARAN YANG DIAMBIL DAN IMPLIKASI

Berbagai temuan penelitian kami memberikan harapan bagi feminis/ organisasi perempuan, departemen pemerintah dan badan-badan pengembangan yang mencari berbagai cara untuk meningkatkan keberagaman keterwakilan perempuan dalam politik. Terdapat kumpulan besar perempuan yang memiliki kapasitas, motivasi dan infrastruktur yang lebih luas untuk menjadi seorang kandidat yang kredibel, dan yang terpenting, suara yang efektif bagi keberagaman perempuan di parlemen. Tugasnya adalah membantu perempuan menemukan garis awal dalam perjalanan mereka ke politik, dan membuka jalan menuju pemilu. Kami menyarankan berikut ini:

## MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERBASIS KEKUATAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI DAN MENDUKUNG PEREMPUAN MENGIKUTI KONTES PEMILU

Terlalu sering, prakarsa untuk memberdayakan perempuan mengikuti kontes pemilu berawal (dan berakhir) dengan pembangunan kapasitas. Penyedia pelatihan perlu memulai dengan mengenali apa kontribusi berharga dari perempuan, dan membantu mereka untuk *membangun* berlandaskan sumber daya dan kekuatan mereka saat ini. Satu jenis latihan untuk semua hal yang berawal dengan asumsi mengenai apa yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan asumsi tentang kesenjangan kapasitas perempuan akan menjadi kurang efektif daripada pelatihan yang khusus disiapkan yang berawal dengan suatu inventaris tentang apa yang dimiliki perempuan, dan persepsi mereka sendiri

*Menjamah perempuan yang bekerja di akar rumput secara dini dalam siklus elektoral sangatlah penting.*

mengenai bagaimana mereka bisa menjalankan kampanye yang efektif.

Organisasi perempuan dan lembaga pengembangan juga berperan dalam mengidentifikasi perempuan yang mungkin belum mengapresiasi keterampilan, pengetahuan, jaringan mereka dan sebagainya, yang digembleng melalui kerja sosial dan komunitas, dapat menjadi sumber daya dalam kampanye politik yang sukses. Peneliti menunjukkan bahwa perempuan sering kali perlu didekati beberapa kali sebelum mereka mempertimbangkan mengikuti kontes pemilu. Menjamah perempuan yang bekerja di akar rumput secara dini dalam siklus elektoral sangatlah penting. Kami juga setuju dengan Tadros (2014: 10) mengenai nilai “program pemberdayaan politik untuk membantu perempuan menemukan selengkapnya hubungan komunitas yang telah mereka gembleng, tetapi yang masih harus mereka manfaatkan ke dalam kampanye politik mereka” (Tadros 2014: 10).

## MEMBANGUN TIM, BUKAN INDIVIDU

Prakarsa untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, dapat dipahami, berfokus pada kandidat individu: motivasi dan kapasitasnya. Tetapi, pemilu adalah upaya tim, dengan perempuan pada khususnya menginginkan dan memerlukan jaringan dukungan. Ada peran bagi organisasi perempuan untuk membina solidaritas dan jaringan informal yang akan memungkinkan kandidat membangun tim di sekeliling mereka. Ini hendaknya termasuk politisi perempuan saat ini atau mantan politisi perempuan yang dapat memberi pendampingan dan membangun solidaritas. Pelatihan dalam keterampilan khusus pemilu hendaknya ditetapkan untuk jaringan dukungan yang lebih

besar, mengenali bahwa kandidat tidak dapat diharapkan untuk meliput semua basis sendiri. Pendekatan yang efektif bisa berupa feminis dan organisasi hak-hak perempuan memberi dukungan yang disesuaikan, misalnya layanan konsultasi, untuk kandidat dan tim mereka, untuk mengembangkan strategi kampanye yang efektif, mengidentifikasi kesenjangan kapasitas apa pun, dan membantu menemukan keahlian yang relevan untuk menutup kesenjangan ini. Membangun tim dan kapasitas gabungan mereka juga dapat menjadi titik awal pembentukan kolektif bagi perubahan kelembagaan di dalam, dan di luar, arena politik (see Nazneen 2019).

## MENGAMBIL PENDEKATAN JANGKA PANJANG SELAMA SIKLUS KEHIDUPAN PEREMPUAN

Organisasi dan lembaga perlu mengambil pendekatan jangka panjang yang mulai bertahun-tahun atau dasawarsa sebelumnya untuk memberi peluang bagi perempuan untuk mengembangkan semua prasyarat yang diperlukan sepanjang hidupnya, sehingga ketika waktunya tepat, ia yakin dapat mencalonkan diri. Kemungkinan kepribadian dibentuk sejak dini ketika kanak-kanak. Apakah perempuan dapat memandang diri mereka sendiri menjadi seorang politisi saat dewasa tergantung pada paparan di awal kehidupan mereka. Beberapa perempuan berbicara tentang perlunya mensosialisasikan kemungkinan politik kepada anak-anak perempuan di sekolah, dan melatih guru untuk mendorong anak perempuan berbicara, dan memberi penghargaan untuk melakukannya. Donor yang bekerja dengan LSM dan organisasi komunitas dapat mengambil pendekatan proaktif untuk memastikan bahwa pemimpin wanita yang bermitra dengan mereka memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka dan menjalani pelatihan tidak hanya untuk mengimplementasikan proyek yang terjangkau, tetapi juga dengan objektif jangka panjang melatih kandidat politik generasi mendatang.

Pendekatan jangka panjang diperlukan untuk bekerja dengan perempuan untuk membentuk lintasan kegiatan sosial akar rumput mereka sejak awal agar sesuai saat memasuki politik perwakilan pada tahap selanjutnya. Beberapa perempuan dalam penelitian kami sebenarnya akan memilih untuk memasuki politik, tetapi belum 'menyemai benih' sejak awal dalam karier mereka. Berbagai lembaga perlu mendorong perempuan untuk menjadi strategis, memandang kegiatan akar rumput mereka yang saling mengisi bagi partisipasi politik, dan mendorong mereka untuk mengembangkan karier dalam cara yang membantu membangun prasyarat untuk mengikuti kontes pemilu, jika mereka menginginkannya pada tahap selanjutnya. Contohnya mencakup mendorong perempuan untuk melaksanakan kerja sosial dalam cara yang saling bersinggungan dengan batas-batas elektoral dan menjadi proaktif dalam mempromosikan pekerjaan baik yang mereka lakukan. Tujuannya tidak perlu membuat perempuan berpikir seperti politisi sejak awal karier mereka, tetapi memperlihatkan kesesuaian antara kerja sosial dan politik, dan membiarkan kemungkinan menjadi kandidat terbuka dalam kehidupan di kemudian hari.

## **BERINVESTASI DALAM MENGHASILKAN KELOMPOK KANDIDAT PEREMPUAN YANG BERPELUANG, BUKAN INDIVIDU**

Memastikan bahwa perempuan yang aktif di akar rumput memiliki *kemungkinan* memasuki politik di kemudian hari, berarti bahwa mayoritas tidak akan beralih ke politik, meskipun ada investasi. Pendekatan ini lebih seperti 'menebarkan benih', melempar jala yang lebar dengan tujuan menghasilkan kelompok perempuan yang mampu memasuki politik, dengan menyadari hanya sebagian kecil akan melakukannya. Lembaga pemberi donor perlu mengapresiasi bahwa investasi seperti ini akan menuai hasil yang secara keseluruhan lebih baik daripada sekadar memberi sumber daya bagi kandidat perempuan yang kemungkinan besar akan mengikuti kontes pemilu yang makin dekat. Tujuannya hendaknya (sama jika tidak melebihi) mempertinggi 'pasokan' perempuan yang akan berpotensi mempertimbangkan untuk memasuki politik, daripada sekadar membantu mereka yang sudah melangkah maju. Jumlah perempuan dalam kategori yang kedua terlalu sedikit untuk mengatasi rendahnya tingkat keterwakilan wanita.

Mengambil pendekatan jangka panjang memerlukan lembaga penanggung dana yang berinvestasi dalam membangun sekelompok kandidat perempuan yang berpotensi yang mungkin tidak terwujud dalam daur hidup proyek yang biasa. Model pendanaan yang menuntut dampak yang dapat ditunjukkan dan dihitung pada akhir proyek akan berlawanan dengan sasaran yang lebih penting dalam membangun generasi perempuan yang akan memasuki politik pada masa mendatang. Prakarsa jangka pendek untuk melatih perempuan menjelang pemilu atau bahkan pada saat dini di siklus pemilu, meskipun berguna, akan berdampak relatif terbatas dalam transformasi yang lebih mendasar yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan dalam politik (lihat juga Jakimow dan Pragati 2021). Dukungan keuangan yang terus menerus dan berjangka panjang bagi berbagai organisasi perempuan dan mahasiswa akan berkontribusi pada peningkatan jumlah kandidat perempuan yang berkualitas dengan potensi memasuki politik.

## **MENGUBAH BUDAYA POLITIK DAN NARATIF POLITIK YANG DOMINAN**

Calon perempuan menghadapi lingkungan politik yang menantang, dan dalam beberapa kasus memusuhi. Namun demikian, budaya politik dapat dan memang berubah. Budaya itu bukannya mau tidak mau bersifat maskulin, 'kotor' atau berciri 'politik uang', misalnya. Prakarsa konkret yang dapat diambil dalam hal ini mencakup promosi naratif laki-laki dan perempuan yang telah berhasil terpilih tanpa memerlukan kampanye yang mahal. Para jurnalis memiliki peran dalam memproduksi muatan media yang memberi pandangan yang

lebih berimbang mengenai apa yang dilakukan politisi dan siapa mereka, melawan kelaziman bahwa politik itu 'kotor' dan semua politisi memiliki kepentingan pribadi. Membangun kelompok media yang berkomitmen memberi ruang untuk mempromosikan kerja sosial dan kampanye perempuan bisa menjadi tindakan yang saling melengkapi. Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan regulasi di media sosial untuk memastikan bahwa perempuan aman menggunakan medium ini dalam promosi karya dan kampanye mereka.

## MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK PENDEKATAN SPESIFIK KONTEKS (LANGKAH BERIKUTNYA)

Keempat operasi tersebut—pengalihan, perluasan, amplifikasi dan penafsiran—bersifat heuristik untuk mengidentifikasi langkah praktis guna meningkatkan jumlah dan keberagaman perempuan dalam politik. Rekomendasi akhir kami bersinggungan dengan tahap berikutnya dalam proses penelitian para penulis: serangkaian Dialog yang Didorong Penelitian (RDD) dengan organisasi yang bekerja untuk mempertinggi partisipasi dan perwakilan perempuan, termasuk organisasi feminis, partai politik, organisasi berbasis komunitas dan sebagainya di Sri Lanka dan Indonesia.

Dalam RDD ini, kami menyampaikan kerangka analitis kami dan melibatkan proses kolektif dari penalaran. Daripada memberi para peserta daftar rekomendasi, kami mendorong mereka untuk berefleksi pada temuan dan apa yang mereka maksudkan bagi praktik mereka sendiri. Diskusi dan bertukar pikiran memungkinkan peserta saling belajar dari satu sama lain, dan yang lebih penting, berkolaborasi dalam upaya yang lebih luas menuju sasaran bersama. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa prakarsa tersebut sesuai untuk kondisi setempat, dan memiliki potensi terbesar untuk menjadi efektif.



© Unsplash / Shavin Peiries

## REFERENSI

---

Baker, Kerry and Sonia Palmieri (2021). Can women dynasty politicians disrupt social norms of political leadership? A proposed typology of normative change, *International Political Science Review*: 1-15

---

Bjarnegård, Elin (2013). *Gender, informal institutions and political recruitment: Explaining male dominance in parliamentary representation*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

---

Choi, Nankyung (2019). Women's political pathways in Southeast Asia, *International Feminist Journal of Politics*, 21(2): 224-248.

---

Cornwall, Andrea and Anne Marie Goetz (2005). Democratizing democracy: Feminist perspectives, *Democratisation*, 12(5): 783-800.

---

Devika, J. and Binitha V. Thampi (2012) *New lamps for old?: Gender paradoxes of political decentralisation in Kerala*. New Delhi: Zubaan.

---

Dewi, Kurniawati Hastuti (2015). *Indonesian women and local politics: Islam, gender and networks in post-Suharto Indonesia*. Singapore: NUS Press and Kyoto University Press.

---

Hannan, Sarah. (2020). Female MPs in the ninth parliament: Get to know them. *The Morning - Sri Lanka News*, <http://www.themorning.lk/female-mps-in-the-ninth-parliament-get-to-know-them/>.

---

Harahap, Aida Fitra, Tanya Jakimow, Asima Yanty Siahaan and Yumasdaleni (2022). Is money an insurmountable barrier to women's political representation in transactional democracies? Evidence from North Sumatera, *Indonesia, Politics, Groups and Identities*.

---

Hawkesworth, Mary (2012). *Political worlds of women: Activism, advocacy and governance in the twenty-first century*. London: Routledge.

---

Iwanaga, Kazuki (2008). Women and politics in Asia: A comparative perspective. In K. Iwanaga (ed.) *Women's Political Representation in Asia* (pp.1-22). Copenhagen: NIAS Press.

---

Jakimow, T. and PRAGATI. (2021). Life-course and cohort impacts in women's pathways to politics: Post-active motherhood as a time of political possibility in India, *Journal of Development Studies*, 57(11): 1795-1806.

---

Jayawardena, Kishali Pinto, and Chulani Kodikara (2003). *Women and governance in Sri Lanka*. Colombo: International Centre for Ethnic Studies. Country report.

---

Inter-Parliamentary Union (2022). Women in parliament in 2021. <https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2022-03/women-in-parliament-in-2021>.

---

Mahsun, Muhammad, Misbah Zulfa Elizabeth, and Solkhah Mufrikhah (2021). Female candidates, Islamic women's organisations, and clientelism in the 2019 Indonesian elections, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1): 73–92

---

Nazneen, Sohela (2019). How do leaders collectively change institutions? DLP Foundational Paper 3, <https://res.cloudinary.com/dlprog/image/upload/how-do-leaders-collectively-influence-institutions>.

---

Norris, Pippa and Joni Lovenduski (1993). 'If only more candidates came forward': Supply-side explanations of candidate selection in Britain, *British Journal of Political Science*, 23: 373–408.

---

Piscopo, Jennifer M. (2019). The limits of leaning in: Ambition, recruitment, and candidate training in comparative perspective, *Politics, Groups and Identities*, 7(4): 817–828.

---

Prihatini, Ella (2019). Women's views and experiences of accessing National Parliament: Evidence from Indonesia, *Women's Studies International Forum*, 74: 84–90.

---

Spark, Ceridwen, John Cox and Jack Corbett (2019). Gender, political representation and symbolic capital: How some women politicians succeed, *Third World Quarterly*, 40(7): 1227–1245.

---

Tadros, Mariz (2014). Engaging politically: Rethinking women's pathways to power. In M. Tadros (ed.) *Women in Politics: Gender, Power and Development* (pp.1–41). London: Zed Books.

---

Vijayarasa, Ramona (2022). *The woman president: Leadership, law and legacy for women based on experiences from South and Southeast Asia*. Oxford University Press.

---

Vijayarasa, Ramona (2020). Women's absence in Sri Lankan politics: Lessons on the effectiveness and limitations of quotas to address under-representation, *Women's Studies International Forum*, 81: 102371

---

Wardani, Sri Budi Eko and Valina Singka Subekti (2021). Political dynasties and women candidates in Indonesia's 2019 election, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1): 28–49.

---

White, Sally and Edward Aspinall (2019). Why does a good woman lose? Barriers to women's political representation in Indonesia, *New Mandala: New Perspectives on Southeast Asia*, <https://www.newmandala.org/wp-content/uploads/2019/12/White-Aspinall-Why-Does-a-Good-Woman-Lose.pdf>.

---



## GAMBAR-GAMBAR

---

hal.1 UN Women, Flickr, Ryan Brown – Diskusi komunitas tentang bagaimana kaum perempuan menyumbang bagi kedamaian di dalam komunitas mereka, Jawa Timur.

---

hal.6 DFAT, Flickr – Staf pengajar di Sekolah Watawala, Sri Lanka.

---

hal.11 DFAT, Flickr, Josh Estey – Perempuan di lokakarya, Lombok Barat.

---

hal.15 Shutterstock, Damar Aji – Proses penghitungan di TPS, pemilu Indonesia 2019 di Kota Yogyakarta.

---

hal.21 Unsplash, Shavin Peiries – Kehidupan kota, Sri Lanka

---



## **Developmental Leadership**

**Program** (Program Kepemimpinan Pembangunan/DLP) adalah kolaborasi penelitian internasional yang didukung oleh Pemerintah Australia.

DLP menginvestigasi peran krusial yang dimainkan para pemimpin, berbagai jaringan dan koalisi dalam mencapai hasil pembangunan.

---

**dlprog.org**  
**dlp@contacts.bham.ac.uk**  
**@DLProg**

---

Developmental Leadership Program  
International Development Department  
College of Social Sciences  
University of Birmingham  
Birmingham, B15 2TT United Kingdom

Design | [squarebeasts.net](http://squarebeasts.net)



---

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan yang dinyatakan dalam publikasi ini adalah pandangan penulis semata-mata dan belum tentu merupakan pandangan Pemerintah Australia, Program Kepemimpinan Pembangunan (DLP) atau organisasi mitra.

